UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**MEDIA ARUS UTAMA DALAM KONSTRUKSI NARASI KEBIJAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90 TAHUN 2023
TERHADAP INDEPENDENSI KPU MELALUI PERSPEKTIF NARRATIVE POLICY FRAMEWORK**
Pramesthi Aura Nawang Savitri, Yuli Isnadi, S.I.P., MPA., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola media arus utama dalam menarasikan pemberitaan yang berkaitan dengan isu independensi pada lembaga KPU pada Pemilu 2024 lalu. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis melalui pendekatan *Narrative Policy Framework* (NPF) dipilih pada penelitian ini dengan berfokus pada aspek elemen dan strategi narasi di dalam berita media arus utama. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dua informan dengan latar belakang di bidang kebijakan publik dan politik elektoral. Lalu, terdapat data sekunder yang bersumber dari narasi pemberitaan tiga media arus utama, yakni Detik.com, Kompas, dan Tempo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis konten dan wawancara semi terstruktur untuk mengidentifikasi pola konstruksi narasi dari ketiga objek media. Hasil penelitian menunjukan bahwa media arus utama menggunakan tiga mekanisme utama dalam menarasikan isu inkonsistensi KPU, yakni penggunaan narasi prosedural-legalistik, personifikasi isu, dan monopoli definisi isu. Ketiga mekanisme tersebut beroperasi secara sinergis melalui dominasi strategi pemosisian karakter *angel shift* dan cakupan konflik *containment.* Strategi tersebut didukung dengan narasi yang dominan memiliki elemen *plot story of control* dan penempatan elemen *character* KPU sebagai *hero*. Pada saat dominasi tersebut berlangsung, Tempo mengambil posisi sebagai *counter narrative* atau narasi tandingan yang cenderung menyoroti kontroversial substantif dari keputusan KPU selama merespon Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa narasi media arus utama berpotensi membatasi ruang diskusi publik dalam menelaah persoalan isu independensi KPU secara substantif.

***Keyword*: *Narrative Policy Framework*, independensi KPU, media arus utama, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023**

MEDIA ARUS UTAMA DALAM KONSTRUKSI NARASI KEBIJAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90 TAHUN 2023
TERHADAP INDEPENDENSI KPU MELALUI PERSPEKTIF NARRATIVE POLICY FRAMEWORK
Pramesthi Aura Nawang Savitri, Yuli Isnadi, S.I.P., MPA., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

This study aims to identify patterns in the mainstream media's coverage of issues related to the independence of the General Elections Commission (KPU) during the 2024 general election. The research method used in this study is a qualitative method employing a case study approach. Analysis using the Narrative Policy Framework (NPF) approach was selected for this study, focusing on the elements and strategies of narrative within mainstream media news reports. The data used to support this study were categorized into two types: primary data and secondary data. Primary data was obtained from two informants with backgrounds in public policy and electoral politics. Secondary data was sourced from news narratives in three mainstream media outlets: Detik.com, Kompas, and Tempo. Data collection techniques included content analysis and semi-structured interviews to identify patterns in narrative construction across these three media outlets. The results of the study show that mainstream media employ three primary mechanisms in narrating the issue of the KPU's inconsistencies: the use of procedural-legalistic narratives, the personification of the issue, and the monopolization of the issue's definition. These three mechanisms operate synergistically through the dominance of the "angel shift" character positioning strategy and the "conflict containment" coverage strategy. This strategy was supported by a dominant narrative featuring a "story of control" plot element and positioning the KPU as the hero. While this dominance persisted, Tempo adopted the role of a counter-narrative that tended to highlight the substantive controversies surrounding the KPU's decisions in response to Constitutional Court Ruling No. 90 of 2023. These findings suggest that mainstream media narratives have the potential to limit the space for public discussion in substantively examining the issue of KPU independence.

Keyword: Narrative Policy Framework, KPU independence, mainstream media, Constitutional Court Decision No. 90 of 2023